



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO : 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor
Ketenagakerjaan tahun 2017-2020

Skripsi

Oleh

Sekarrayi Junio Ridho Gusti

2017330163

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO : 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor
Ketenagakerjaan (2017-2020)

Skripsi

Oleh

Sekarrayi Junio Ridho Gusti

2017330163

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Sekarrayi Junio Ridho Gusti
Nomor Pokok : 2017330163
Judul : Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor Ketenagakerjaan
(2017-2020)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 23 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt K. Pakpahan

: 

Sekretaris

Dr. A. Irawan J.H

: 

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sekarrayi Junio Ridho Gusti
NPM : 2017330163
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor
Ketenagakerjaan (2017-2020)

Menyatakan bahwasanya skripsi ini merupakan buah karya ilmiah yang ditulis sendiri dan bukan hasil karya yang pernah diajukan pihak lain untuk memperoleh gelar akademik. Adapun karya maupun pendapat pihak lain dalam karya ini telah dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab. Penulis siap untuk menerima konsekuensi yang sesuai apabila di masa yang akan datang dapat dibuktikan bahwa pernyataan ini tidak benar.

Tangerang Selatan, 14 Juli 2021



Sekarrayi Junio Ridho Gusti
2017330163

ABSTRAK

Nama : Sekarrayi Junio Ridho Gusti
NPM : 2017330163
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor
Ketenagakerjaan (2017-2020)

Masyarakat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sangat disayangkan, kondisi di Indonesia tidak dapat mendukung seluruh masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Tawaran pekerjaan datang dari negara-negara dengan perekonomian lebih baik dan membutuhkan tenaga kerja asing, salah satunya adalah Taiwan. Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan membutuhkan koordinasi dari negara pengirim dan negara penerima dalam sebuah kerjasama sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, penulis menggunakan teori dan konsep kerjasama internasional, ketenagakerjaan, migrasi pekerja, dan kerjasama dalam sektor ketenagakerjaan dalam melakukan penelitian ini. Adapun temuan yang didapatkan penulis adalah, kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam sektor ketenagakerjaan dilakukan untuk mengelola PMI di Taiwan yang dilakukan oleh pihak Indonesia maupun pihak Taiwan secara bersamaan. Kerjasama ini membawa keuntungan bagi negara penerima dan negara pengirim. Negara penerima dapat mengisi kekosongan ketenagakerjaan, negara pengirim dapat melindungi pekerja mereka di negara penerima.

Rekomendasi penulis adalah, keterlibatan lebih dari pihak Taiwan dalam perlindungan PMI di negaranya akan meningkatkan performa kerjasama sektor ketenagakerjaan ini. Diperlukan pula cakupan kerjasama perekrutan, penempatan, dan perlindungan PMI di Taiwan yang lebih komprehensif. Selain memperluas, intensitas pengawasan pada perlindungan PMI terutama pada sektor perikanan dan informal juga perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, PMI (Pekerja Migran Indonesia), Kerjasama, Indonesia, Taiwan.

ABSTRACT

Name : Sekarrayi Junio Ridho Gusti
NPM : 2017330163
Department of Study : International Relation
Title : Indonesia-Taiwan Bilateral Cooperation on Employment Sector (2017-2020)

In order to fulfilled their economic needs, society need to work. But the condition in Indonesia can not support their need to works. Regarding this matter, there are countries who need additional foreign workers in their country. Taiwan is one of those countries who offer jobs to Indonesian workers. The existence of Indonesia foreign workers in Taiwan must created the needs of coordination between Indonesia and Taiwan. This coordination was done through cooperation on employment sectors. Some theories are used in this research such as international cooperation, concept of employment, theories of migrant workers, and the theory of international cooperation in employment sector. With these theories and concepts, found that the cooperation on employment sectors between both countries was made in order to manage the existence of PMI in Taiwan. The cooperation was done by Indonesia and Taiwan as this cooperation fulfilled their interests. Taiwan can filled their shortage on labor, Indonesia can guaranteed their workers rights in Taiwan.

There are some recommendation might be applied to this issues. The first one is, Taiwan has to contribute more on PMI protection in Taiwan, not just on recruitment and placement sector. The more comprehensive cooperation between both actors is needed in order to create a better management on Indonesian workers problems in Taiwan. Not only comprehensive, the cooperation need to intensify it works on PMI who works in fisheries sectors and informal sectors. These sectors are usually hard to reach, so the cooperation need to in this matter.

Keywords: Employment, Indonesian Workers, Cooperation, Indonesia, Taiwan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatnya sebanyak-banyaknya pada Allah SWT karena atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan target penulis.

Skripsi ini berupaya membahas kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam sektor ketenagakerjaan sebagai respon terhadap keberadaan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka skripsi ini berjudul **“Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor Ketenagakerjaan (2017-2020).”** Skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

Karya penulis ini merupakan sebuah karya yang jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis sangat terbuka akan kritik dan saran terkait tugas akhir penulis ini. Meskipun tidak sempurna, penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Ucapan Terimakasih

Penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih bagi pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan studi penulis di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis akan mengucapkan terimakasih secara khusus kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan ridho-Nya kepada penulis. Penulis bisa sampai tahap ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena izin-Nya.
2. Penulis, terimakasih telah bertahan sampai di tahap ini. Terimakasih atas semua hal yang telah penulis lakukan untuk menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini. Terimakasih sudah mau berusaha dan terus berusaha untuk menjalani tahap-tahap selanjutnya dalam kehidupan.
3. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, terutama Mas Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan selalu mendorong penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Papa dan Mama selaku orang tua penulis yang telah mengorbankan banyak hal termasuk materi dan waktu untuk membesarkan penulis. Terimakasih atas dorongan yang diberikan sejak penulis kecil hingga saat ini. Terimakasih pula kepada Mas dan Adik penulis yang turut menjadi salah satu alasan penulis bisa sampai di titik ini.
5. Teman-teman penulis dari MAKO Ent., Pojokan dan teman-teman SMA penulis, Asal Ledak, serta teman-teman internet penulis yang terus

mendengarkan seluruh cerita penulis selama menempuh kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan langsung dan tidak langsung yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
Ucapan Terimakasih	vi
DAFTAR ISI	viii
Daftar Singkatan	x
BAB I	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Deskripsi Masalah	4
1.2.2. Pembatasan Masalah	6
1.2.3. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kajian Literatur	8
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.1. Metode Penelitian	18
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	19
1.7. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	21
2.1 Besarnya Angka Angkatan Kerja di Indonesia	21
2.2 Rendahnya Tingkat Pendidikan Mayoritas Tenaga Kerja di Indonesia ...	24
2.3 Pekerja Indonesia Mengisi 17 Kategori Lapangan Kerja	31
2.4 Besarnya Proporsi <i>Unskilled Workers</i> pada Lapangan Kerja di Indonesia 34	
2.5 Permasalahan pada Sektor Ketenagakerjaan di Indonesia	38
2.6 Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri	42
BAB III	48
3.1. Demografi Taiwan Berdasarkan Usia Kerja	48
3.2. Tingginya Tingkat Pendidikan Mayoritas Pekerja Taiwan	50

3.3.	Kecenderungan Pekerja Taiwan memenuhi <i>Skilled Jobs</i>	54
3.4.	Permasalahan pada Sektor Ketenagakerjaan di Taiwan.....	61
3.4.1.	Angka Kelahiran Rendah dan <i>Aging Society</i>	61
3.4.2.	<i>Talent shortage</i> dan <i>labor shortage</i>	64
3.5.	Strategi Impor Tenaga Kerja Asing oleh Taiwan.....	66
3.6.	Eksistensi Tenaga Kerja Asing memenuhi Sektor <i>Non-skilled Jobs</i> di Taiwan.....	70
BAB IV	74
4.1	Isu-isu Pekerja Migran Indonesia di Taiwan	74
4.2	Penanggung Jawab Pekerja Migran Indonesia dari Indonesia.....	77
4.2.1.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	77
4.2.2.	Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).....	79
4.2.3.	BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)	82
4.3	Penanggung Jawab Pekerja Migran Indonesia dari Taiwan.....	85
4.3.1.	Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan.....	85
4.3.2.	TETO (Taipei Economic and Trade Office).....	87
4.4.	Hubungan Kerjasama Indonesia dan Taiwan.....	89
4.5.	Keterbukaan Taiwan pada Kedatangan Pekerja Migran Indonesia	91
4.6.	MoU Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Dasar Kerjasama Indonesia & Taiwan dalam Sektor Ketenagakerjaan	93
4.6.1.	Mempersingkat Alur Perekrutan dan Penempatan PMI di Taiwan	95
4.6.2.	Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia di Taiwan	97
4.6.3.	Pemberantasan PMI Ilegal.....	100
BAB V	102
DAFTAR PUSTAKA	106

Daftar Singkatan

3D	<i>Dirty, difficult, and dangerous</i>
ABK	Anak buah kapal
BNP2TKI	Badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia
BP2MI	Badan pelindung pekerja migran Indonesia
BPS	Badan pusat statistik
DHSC	Direct hiring service centre
HAM	Hak asasi manusia
ILO	International labor organization
KDEI	Kantor dagang dan ekonomi Indonesia
Kemnaker	Kementerian ketenagakerjaan
MoL	Ministry of labor
MoU	Memorandum of understanding
PMI	Pekerja migran Indonesia
P3MI	Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
SD	Sekolah dasar
SLTA	Sekolah lanjutan tingkat atas
SLTP	Sekolah lanjutan tingkat pertama
SMA	Sekolah menengah atas
SMK	Sekolah menengah kejuruan

SMP	Sekolah menengah pertama
SP2T	Special placement program to Taiwan
TETO	Taiwan economic and trade office
TKI	Tenaga kerja Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk bertahan hidup, masyarakat haruslah bergantung pada kondisi perekonomian keluarga mereka. Kondisi perekonomian masyarakat ditentukan oleh pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan.¹ Ketiga penentu ini memiliki keterkaitan antar satu dan lainnya. Pendapatan diperoleh dengan cara yang paling umum, yaitu bekerja. Untuk bekerja, masyarakat usia kerja harus memenuhi kualifikasi perekrut tenaga kerja. Kualifikasi utama calon pekerja ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, umumnya didapatkan dari hasil pendidikan, baik formal maupun non-formal.²

Sangat disayangkan masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak dapat memenuhi kualifikasi yang disediakan di lapangan kerja. Hal ini didorong oleh rendahnya taraf pendidikan angkatan kerja Indonesia. Akibat dari minimnya pendidikan adalah kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja yang terbatas, mereka yang tidak bisa memenuhi standar harus rela digaji kecil dengan jam kerja yang kadang diluar batas wajar.

Tawaran untuk bekerja di luar negeri dengan gaji dan jam kerja yang sesuai muncul ke permukaan. Pencari kerja meraih kesempatan dengan tawaran

¹ Abdul Syani, "Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan," Jakarta: Bumi Aksar, (2012), 73.

² Ibid.

menggiurkan ini dengan senang hati. TKI (Tenaga kerja Indonesia) adalah orang-orang yang didorong oleh kesulitan ekonomi dan lapangan kerja yang kurang memadai untuk mencari peluang di tempat baru.³ Selain itu, iming-iming janji manis gaji besar oleh agen penempatan TKI juga menjadi salah satu alasan utama mereka berangkat ke luar negeri.⁴

Tenaga kerja asing bukanlah hal yang tidak lumrah di Indonesia, melainkan sudah menjadi sesuatu yang sangat familiar. Sejak jaman penjajahan Belanda, tenaga kerja Indonesia telah dikirim untuk melakukan kegiatan berkebun di Suriname, yang juga merupakan jajahan Belanda kala itu.⁵ Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1960-an, cakupan penempatan tenaga kerja Indonesia meluas. Selain Suriname, negara-negara di Arab Saudi dan negara tetangga, Malaysia, juga menjadi tujuan para TKI untuk mencari peruntungan. tenaga kerja Indonesia yang dijadikan tenaga kerja asing di luar Indonesia adalah kegiatan ilegal.

Berjalan secara ilegal selama bertahun-tahun, akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1970 yang mengatakan bahwa regulasi penempatan TKI akan dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Pihak pemerintah yang dimaksud di sini adalah petugas dari program Antarkerja Antarnegara (AKAN) dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan

³ Gita Amanda, "Faktor Ekonomi Penyebab Utama Warga Jadi TKI," *Republika Online* (Republika Online, 18 September 2018), <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/18/pf87yw423-faktor-ekonomi-penyebab-utama-warga-jadi-tki>.

⁴ *Ibid.*

⁵ "Profil BP2MI," BP2MI, diakses 19 April 2021, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

Koperasi. Sedangkan pihak swasta yang dimaksud adalah agen-agen khusus yang selama ini membantu TKI untuk sampai di negara tujuan.⁶

Campur tangan pemerintah dalam persoalan tenaga kerja Indonesia ini sedikit banyak dilatar belakangi oleh kontribusi TKI pada perekonomian nasional yang positif.⁷ Pemerintah melakukan regulasi dan menaungi keberadaan TKI di luar negeri. Sejak saat itu, jumlah TKI meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1992, jumlah TKI meningkat secara massif mencapai jumlah 158.750 orang.⁸

Seiring berkembangnya waktu dan kemampuan Indonesia dalam membentuk hubungan dengan aktor internasional, negara tujuan penempatan TKI juga ikut bertambah. Saat ini, terdapat kurang lebih 23 negara yang siap menerima TKI.⁹ Negara-negara ini terbagi di hampir seluruh kawasan, mulai dari kawasan Timur Tengah, ASEAN, Asia Timur, Amerika Serikat, Eropa, hingga kawasan Afrika. Di antara 23 negara yang tersebar di seluruh kawasan ini, terdapat 10 negara penempatan dengan jumlah TKI terbanyak. Negara-negara yang dimaksud adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Italia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.¹⁰

⁶ Ibid.

⁷ "Ini Asal Usul Dan Sejarah TKI Pertama Kali," merdeka.com, 15 Oktober 2013, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-asal-usul-dan-sejarah-tki-pertama-kali.html#:~:text=Dimulai%20pada%201890%20Dan%2C%20jauh,saat%20itu%20merupakan%20jajahan%20Belanda.>

⁸ Ibid.

⁹ "Kelembagaan Penempatan," BP2MI, diakses 20 April 2021, <https://bp2mi.go.id/negara-tujuan/indeks>.

¹⁰ Muhammad Idris, "10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Taiwan Hampir Samai Malaysia Halaman All," KOMPAS.com (Kompas.com, 28 April 2020),

Negara-negara tempat TKI dipekerjakan turut memiliki kontribusi dalam bertanggung jawab terkait persoalan TKI. Sebagai salah satu wilayah dengan peminat TKI terbanyak ke-2, Taiwan secara langsung dan tidak langsung juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola keberadaan TKI di negaranya. Tidak hanya Taiwan, Indonesia sebagai negara pengirim TKI pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam persoalan ini. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Taiwan. Melihat keduanya memiliki tanggung jawab dalam persoalan TKI, maka keduanya perlu melakukan koordinasi satu dengan yang lainnya guna mengelola permasalahan TKI di Taiwan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan di sekitar sektor ketenagakerjaan. Penulis akan melakukan penelitian pada interaksi aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam sektor ketenagakerjaan, terutama dalam konteks permasalahan tenaga kerja asing. Penelitian yang akan dilakukan penulis berjudul **“Kerjasama Bilateral Indonesia-Taiwan dalam Sektor Ketenagakerjaan (2017-2020)”**

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Merujuk pada pembahasan latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa sektor ketenagakerjaan merupakan penyokong utama

kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama di Indonesia. Salah satu pekerjaan yang acap kali terkenal dalam sektor ketenagakerjaan adalah tenaga kerja suatu negara yang dikirim ke luar negeri. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkenal dengan tenaga kerja-nya yang biasa disebut tenaga kerja Indonesia (TKI). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, tenaga kerja Indonesia merupakan setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan upah.¹¹ TKI yang dikirim keluar negeri akan menjadi tenaga kerja asing di tempat negara penerima TKI. Taiwan, sebagai salah satu negara penerima TKI mengartikan tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya akan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Taiwan.¹² Keberadaan TKI di Taiwan tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan tertentu. Persoalan-persoalan ini mencakup proses penempatan, perlindungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keberadaan TKI di Taiwan.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kedua negara yaitu Taiwan dan Indonesia melakukan kegiatan mengirim dan menerima tenaga kerja asing di wilayah mereka. Jika kedua pemerintahan dari kedua wilayah telah menaruh perhatian pada permasalahan ini, maka ini artinya kedua aktor tersebut siap untuk mengemban tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab utama dari kedua aktor ini adalah untuk melindungi warganya dari

¹¹ Undang Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1

¹² "Work Policy for Foreign Workers," Workforce Development Agency, 2 Agustus 2017, <https://www.wda.gov.tw/en/cp.aspx?n=7AD71E73F645F2A5>.

pelanggaran terhadap hak mereka sebagai pekerja. Tidak sedikit jumlah permasalahan yang bisa terjadi pada tenaga-tenaga kerja asing. Mulai dari konflik kecil sampai besar dengan majikan atau yang mempekerjakan mereka, gaji yang tidak dibayar sesuai perjanjian, penganiayaan, hingga perdagangan manusia tidak luput menimpa para tenaga kerja ini.¹³

Dapat dipahami, bahwa kedua aktor internasional ini memiliki andil untuk bertanggung jawab terkait persoalan tenaga kerja. Indonesia, sebagai negara pengirim dan Taiwan sebagai wilayah penerima TKI. Sebagai aktor-aktor yang bertanggung jawab terkait permasalahan seputar TKI, maka diperlukan koordinasi yang baik antar kedua aktor tersebut. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama untuk saling memenuhi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan untuk melindungi masyarakat Indonesia di Taiwan dan penduduk di Taiwan.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian penulis sedikit banyak telah dijelaskan pada bagian deskripsi masalah. Untuk menghindari terlampauinya konteks pembahasan yang diinginkan oleh penulis terkait permasalahan di atas, penulis akan melakukan pembatasan pada masalah tersebut. Hal ini dilakukan guna pembahasan penelitian akan lebih jelas dan terfokus. Penulis akan memfokuskan penelitian pada kedua aktor yang

¹³ “Permasalahan TKI Di Luar Negeri, Dijebak Jadi PSK Hingga Upah Di Bawah Standar,” merdeka.com, 26 Februari 2018, <https://www.merdeka.com/uang/permasalahan-tki-di-luar-negeri-dijebak-jadi-psk-hingga-upah-di-bawah-standar.html#>.

sering disebut dalam pembahasan di atas, yaitu Indonesia dan Taiwan. Penulis akan melihat dinamika hubungan keduanya, terutama seputar sektor ketenagakerjaan. Penulis juga akan melihat bagaimana kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam sektor ketenagakerjaan membawa imbas pada kedua aktor yang terlibat. Hal ini berlandaskan pada pengertian bahwa sumber daya manusia Indonesia yang pergi untuk mencari kerja ke luar negeri sering kali dikatakan sebagai penyelamat devisa negara. Pembatasan waktu pada penelitian akan dimulai pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pemilihan periode waktu ini berdasarkan pada inisiatif pemerintah Taiwan untuk menjadikan impor tenaga kerja asing sebagai salah satu strategi untuk menutup kekosongan tenaga kerja di Taiwan.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi dasar penelitian ini adalah **“Bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Taiwan dalam sektor ketenagakerjaan tahun 2017-2020?”**.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara baik permasalahan pada penelitian. Maksud dari hal ini adalah, penulis dapat menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan Taiwan dalam

sektor ketenagakerjaan. Penjelasan mengenai bagaimana kerjasama tersebut berakibat terhadap masing-masing aktor juga diharapkan dapat ditemukan seperti, apakah kerjasama ini membawa keuntungan bagi sektor perekonomian kedua pihak. Jawaban dari hal ini diharapkan dapat terjabarkan dengan baik melalui setiap poin yang disampaikan penulis melalui tulisan ini.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang ingin menambah pengetahuan mengenai permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memenuhi keingintahuan pembaca tentang persoalan seputar hubungan antara Indonesia dengan Taiwan, terutama terkait permasalahan isu tenaga kerja. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya dengan permasalahan serupa, yaitu permasalahan yang meliputi tiga hal. Tiga hal yang dimaksud adalah kerjasama Indonesia dan Taiwan, sektor ketenagakerjaan, dan persoalan tentang migrasi pekerja asing.

1.4. Kajian Literatur

Literatur pertama yang akan dijadikan penulis sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini adalah literatur yang membicarakan tentang

migrasi pekerja Vietnam ke Thailand.¹⁴ Dikatakan, bahwa migrasi pekerja Vietnam kepada Thailand merupakan salah satu dampak dari integrasi ASEAN FTA dan juga program kerjasama ekonomi dari ADB GMS. Di awal 1980-an, Vietnam menyetujui bahwasanya penempatan tenaga kerja asing Vietnam di luar negeri merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara legal oleh pemerintah. Hal ini dijadikan strategi untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan faktor perekonomian, para pencari kerja berangkat ke negara-negara tujuan seperti Korea Selatan, Malaysia, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Namun, seiring waktu, tenaga kerja asing Vietnam tidak merasa cukup dengan pendapatannya. Terbukanya Thailand pada pekerja asing dari Vietnam, menjadi kesempatan emas bagi para pekerja. Meskipun dapat saling memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan, absennya kerjasama Vietnam dan Thailand menjadi kendala bagi tenaga kerja asing Vietnam. Sangat disayangkan, hal ini menyebabkan tenaga kerja Vietnam bekerja secara ilegal dan jauh dari perlindungan negaranya. Diperlukan kerjasama yang erat antar kedua negara ini guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja asing Vietnam di Thailand.¹⁵

Literatur selanjutnya menjadi acuan penulis adalah literatur yang menjabarkan terjadinya pergeseran negara tujuan migrasi pekerja asing.¹⁶

¹⁴ Nancy Huyen Nguyen dan John Walsh, "Vietnamese Migrant Workers in Thailand - Implications for Leveraging Migration for Development," *Journal of Identity and Migration Studies* 8, no. 1 (2014), 78-86

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jian-Bang Deng, et al, "Labor Migration from Southeast Asia to Taiwan: Issues, Public Responses and Future Development," *Asian Education and Development Studies* 10, no. 1 (2020): pp. 69-81, <https://doi.org/10.1108/aeds-02-2019-0043>, 69-73.

Dewasa ini, destinasi pekerja migran sudah jauh lebih bervariasi dari sebelumnya. Persyaratan negara destinasi adalah peluang untuk perekonomian yang lebih baik, salah satunya adalah Taiwan. Pada tahun 1989, sebuah kebijakan untuk merekrut tenaga kerja asing dibentuk guna memenuhi kebutuhan Taiwan akan kekosongan tenaga kerja.¹⁷ Keterbukaan Taiwan dalam menerima tenaga kerja asing menjadi peluang bagi para pekerja di negara-negara tetangga Taiwan. Tenaga kerja asing di Taiwan mayoritas merupakan pekerja dari empat negara di Asia Tenggara. Rentang perekonomian negara-negara pengirim dan Taiwan, merupakan alasan arus migrasi pekerja dari negara-negara di Asia Tenggara ke Taiwan tergolong deras. Tahun 2007, Taiwan mengeluarkan kebijakan baru untuk melengkapi ESA (the Employment Service Act) yang dikeluarkan tahun 1992 lalu. Hal ini guna untuk mengontrol jumlah tenaga kerja asing di Taiwan. Hadirnya kebijakan ini tidak membantu kondisi tenaga kerja asing di Taiwan.¹⁸ Mereka ditimpa isu-isu pelanggaran HAM yang dialami tenaga kerja asing, pemerasan calon pekerja oleh agen perantara, penganiayaan *careworkers* dan dijadikan pekerja seksual, serta imej buruk yang didapatkan negara. Imej buruk ini didapat karena kegagalan negara dalam melindungi pekerjaannya di negara asing.

Permasalahan yang terjadi akibat tenaga kerja asing di Taiwan ini merupakan sebuah permasalahan yang mengharuskan adanya campur tangan dari baik negara pengirim dan negara penerima. Kedua negara haruslah

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Jian-Bang Deng, et al, "Labor Migration from Southeast Asia to Taiwan: Issues, Public Responses and Future Development," 73-80

bekerjasama guna mendapatkan keuntungan agar dapat melindungi kepentingan masing-masing, termasuk melindungi warga negara mereka di negara orang. Pemerintah dikatakan harus sigap dalam menanggapi permasalahan seputar bidang ketenagakerjaan ini, terutama tenaga kerja asing.¹⁹

Literatur ketiga yang juga menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini memaparkan upaya Indonesia dalam mengatur tenaga kerja Indonesia.²⁰ Literatur ini melihat dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengatur tenaga kerja asing Indonesia, mulai dari arus migrasi pekerja yang *circular*, pemerintahan Indonesia, remitansi sebagai pembantu perekonomian Indonesia, dan juga arus multi-direksi. Untuk mengatasi persoalan TKI, Indonesia memiliki dua badan yang bersebrangan. Yang pertama adalah Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia condong lebih dekat dengan agen-agen perekrut TKI yang *money driven*, sedangkan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) lebih dekat dengan LSM yang melindungi hak-hak pekerja. Pemanfaatan tenaga kerja asing merupakan sebuah strategi yang dapat membawa *'triple win'* bagi pihak-pihak yang terlibat. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja negara penerima, meningkatnya kemampuan tenaga kerja negara dan meningkatkan perekonomian negara pengirim, dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing adalah *triple win* tersebut. Peningkatan perekonomian

¹⁹ Ibid.

²⁰ Charanpal S. Bal dan Wayne Palmer, "Indonesia and Circular Labor Migration: Governance, Remittances and Multi-Directional Flows," *Asian and Pacific Migration Journal* 29, no. 1 (2020): pp. 3-11, <https://doi.org/10.1177/0117196820925729>, 4-9.

negara melalui remitansi berkontribusi banyak bagi Indonesia.²¹ Meskipun remitansi tidak berkontribusi banyak pada perekonomian Indonesia di tahun 2018, perekonomian Indonesia di tahun-tahun sebelumnya terbantu oleh remitansi. Di era migrasi pekerja multi arah ini, perlindungan penuh bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri maupun tenaga kerja asing di Indonesia harus segera terlaksana. Hal ini harus dijadikan prioritas kebijakan pemerintah Indonesia.²²

1.5. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari paham pluralis, setiap kondisi yang terjadi pada aktor-aktor internasional merupakan kondisi yang membutuhkan kerjasama.²³ Pemahaman ini berarti, kerjasama internasional maupun kolaborasi internasional merupakan kunci untuk menciptakan perdamaian dunia. Interaksi aktor untuk saling memenuhi kebutuhan terwujud dalam bentuk kerjasama internasional. Helen Milner mengatakan terdapat dua elemen penting dalam terbentuknya kerjasama internasional.²⁴ Yang pertama adalah, aktor harus menyadari dan membentuk tujuan yang sama berdasarkan rasionalitas masing-masing aktor. Maksudnya tujuan yang sama adalah bagaimana para aktor menyadari bahwa kerjasama ini akan membawa keuntungan bagi keduanya. Umumnya, para

²¹ Charanpal S. Bal dan Wayne Palmer, "Indonesia and Circular Labor Migration: Governance, Remittances and Multi-Directional Flows," 4-9.

²² Ibid.

²³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics 5th Edition* (Boston, MA: Pearson, 2012), 129-131

²⁴ Helen Milner, "International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses," *World Politics* 44, no. 3 (1992): pp. 466-496, <https://doi.org/10.2307/2010546>, 467-468.

aktor akan menyesuaikan kebijakan kerjasama mereka sesuai dengan keuntungan masing-masing. Elemen penting yang ke dua adalah keuntungan yang harus diperoleh melalui kerjasama internasional. Keuntungan yang maksimal dari kerjasama internasional dapat diperoleh melalui repositas.²⁵ Sebastian Paulo turut mengatakan bahwa kerjasama internasional adalah bentuk interaksi yang berlangsung di antara aktor-aktor internasional²⁶ Interaksi ini terjadi saat aktor internasional memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kepentingan aktor yang terlibat. Dalam melakukan kerjasama, kepentingan yang dimiliki aktor-aktor ini tidaklah selalu sama, melainkan sering kali terdapat konflik kepentingan. Kerjasama internasional akan menghasilkan kebijakan domestik maupun internasional yang akan diimplementasikan oleh aktor-aktor yang terlibat.²⁷ Hingga saat ini, negara masih memegang peran terpenting dalam pembuatan kebijakan.

Axelrode dan Keohane turut berpendapat, “...*cooperation can only take place in situations that contain a mixture of conflicting and complementary interests.*”²⁸ Maksudnya adalah, kerjasama internasional dapat terwujud di saat ada kepentingan-kepentingan yang berbeda namun saling melengkapi. Setidaknya terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mendukung

²⁵ Ibid.

²⁶ Sebastian Paulo, *International Cooperation and Development a Conceptual Overview* (Bonn, Germany: DIE, 2014), 3.

²⁷ Ibid, 17-20.

²⁸ Robert Axelrode dan Robert O. Keohane, “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions,” *World Politics* 38, no. 01 (1985): pp. 226-254, <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x84c.12>, 226 -235

terjadinya kerjasama internasional yaitu kesamaan tujuan, mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan, dan jumlah aktor.

Bergantung pada resiprositas merupakan strategi terbaik dalam menjalankan kerjasama yang melibatkan dua aktor, atau bilateral.²⁹ Perjanjian hasil kerjasama bilateral ini biasanya mencakup sektor politik, ekonomi, budaya, dan sektor-sektor serupa lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brandon J Kinne, secara empiris, suatu bentuk kerjasama bilateral antar dua negara atau aktor dapat membuka jalur kerjasama bilateral di sektor lain. Sebagai contoh, jika pada awalnya dua negara memiliki kerjasama di bidang ekonomi, maka kerjasama ini akan membuka kerjasama baru di bidang kebudayaan.³⁰

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Taiwan merupakan sebuah kerjasama dalam sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan tenaga kerja.³¹ Cakupan ini tidak dibatasi oleh periode sebelum, saat, dan sesudah tenaga kerja menjalani masa kerja atau kontrak kerja. Sama seperti sektor lain, sektor ketenagakerjaan turut dilindungi oleh hukum, biasanya terdapat pada hukum ketenagakerjaan.³²

²⁹ Ibid.

³⁰ Brandon J Kinne, "Network Dynamics and the Evolution of International Cooperation," *American Political Science Review* 107, no. 4 (Agustus 2013): pp. 766-785, <https://doi.org/10.1017/s0003055413000440>, 766-768.

³¹ Ari Welianto, "Ketenagakerjaan: Pengertian, Kelompok Dan Klasifikasi Tenaga Kerja Halaman All," KOMPAS.com (Kompas.com, 14 Juli 2020), <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/14/130000269/ketenagakerjaan-pengertian-kelompok-dan-klasifikasi-tenaga-kerja?page=all>.

³² Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), 1-3.

Mengutip dari Sumarsono dan Mulyadi, tenaga kerja merupakan seseorang yang dalam batas umur pekerja, melakukan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan masyarakat akan produk atau jasa mereka.³³ Menurut Saparini dan Basri, tenaga kerja terbagi menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan status pekerjaan masyarakat yang termasuk pada rentang umur pekerja. Tenaga kerja juga terbagi berdasarkan keterampilan yang mereka miliki.³⁴ Yang pertama adalah golongan pekerja dengan kemampuan rendah atau *unskilled workers*. *Unskilled workers* merupakan pekerja dengan kemampuan yang tidak memerlukan riwayat akademis maupun keterampilan khusus. Pada umumnya, *unskilled workers* bekerja pada bidang-bidang yang menggunakan tenaga sebagai sumber utama pengerjaannya seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, janitor, dan sebagainya. *Semi-skilled workers* merupakan para pekerja yang keterampilannya di atas *unskilled workers*. Biasanya, para *semi-skilled workers* ini memiliki tamatan SMA sederajat. Profesi yang memerlukan keterampilan *semi-skilled workers* adalah petugas keamanan, pelayan restoran, supir taksi, dan sejenisnya. Golongan pekerja terakhir yang dibagi berdasarkan keterampilan adalah *skilled workers*. Golongan ini merupakan pekerja yang memiliki keterampilan khusus, umumnya didapatkan dari pendidikan minimal tingkat sarjana. *Skilled workers* dapat dijumpai pada pekerjaan seperti suster,

³³ Devi Lestyasari, "HUBUNGAN UPAH MINIMUM PROVINSI DENGAN JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL DI JAWA TIMUR," Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) 1, no. 3 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%p>, 3.

³⁴ Tyler Riddell, "Construction Project Management Software: Unskilled vs. Skilled: eSUB," eSUB Construction Software, 29 Maret 2021, <https://esub.com/blog/unskilled-semi-skilled-skilled-labor-defined/>.

insinyur, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, dan pekerjaan lain yang serupa.³⁵

Dalam dunia dewasa ini yang tercipta hasil globalisasi dan interkoneksi tanpa batas dimanfaatkan pencari kerja untuk bermigrasi guna memenuhi kebutuhan ekonomi.³⁶ Pencari kerja akan memilih negara-negara dengan perekonomian yang lebih baik dan membutuhkan tenaga kerja. Pemahaman ini adalah pemahaman *The New Economic of Migration*.

Umumnya tawaran pekerjaan di negara-negara dengan perekonomian baik pada tenaga kerja asing adalah pekerjaan pada sektor 3D.³⁷ 3D (*dirty, dangerous, and difficult*) merupakan sektor-sektor pekerjaan yang dianggap kotor, berbahaya, dan sulit untuk dilakukan. Biasanya, pekerja domestik enggan untuk melakukan pekerjaan ini sehingga dapat diisi oleh tenaga kerja asing. Pekerjaan ini umumnya terdapat pada sektor konstruksi, manufaktur, agrikultur, dan sektor pekerjaan serupa lainnya.

Keberadaan tenaga kerja asing di suatu negara memerlukan adanya koordinasi antara negara asal tenaga kerja dan negara tempat tenaga kerja itu bekerja. Dari titik inilah, terbentuklah kerjasama antar negara dalam sektor ketenagakerjaan. Meyers mengatakan bahwa kerjasama internasional dalam migrasi pekerja merupakan produk *bargain model*.³⁸ Keberhasilan kerjasama

³⁵ Tyler Riddell, "Construction Project Management Software: Unskilled vs. Skilled: ESUB,"

³⁶ Douglas S. Massey et al., "Theories of International Migration: A Review and Appraisal," *Population and Development Review* 19, no. 3 (1993): p. 431, <https://doi.org/10.2307/2938462>, 432-433.

³⁷ Nisar Mohammad Ahmad et al., "Malaysians' Reluctance to Work in Local 3D Sectors: A Preliminary Review," *The Journal of Social Sciences Research*, no. SPI4 (2018): pp. 220-223, <https://doi.org/10.32861/jssr.sp4.220.223>, 220.

³⁸ Eytan Meyers, *Multilateral Cooperation, Integration and Regimes: the Case of International Labor Mortality* (La Jolla, CA: Center for Comparative Immigration Studies, University of

ini ditentukan oleh penawaran yang ditawarkan negara pengirim pada negara penerima. Dikatakan jika negara penerima terbuka dengan tenaga kerja asing, maka keduanya kerjasama dalam sektor ketenagakerjaan akan terjadi. ILO mengatakan bahwa kerjasama ketenagakerjaan antar negara yang paling efektif hingga saat ini adalah kerjasama dalam bentuk perjanjian bilateral.³⁹ Perjanjian ini berjalan dalam berbagai bentuk, baik perjanjian formal maupun nota kesepahaman. Nota kesepahaman lebih umum digunakan karena perjanjian ini membuat negara-negara yang terlibat untuk melakukan negosiasi kebijakan dan implementasinya.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya, persoalan migrasi pekerja harus dicampur tangani oleh negara-negara yang bersangkutan.⁴¹ Sebuah kerjasama dalam sektor ketenagakerjaan akan dianggap berjalan dengan efektif jika keduanya mampu untuk mengelola persoalan migrasi pekerja secara menyeluruh. Seluruh aspek dalam sektor ketenagakerjaan seperti penempatan, pengembangan, hingga perlindungan tenaga kerja harus dikelola oleh negara-negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja asing tersebut.

Penulis akan melakukan penelitian terkait kerjasama bilateral Indonesia-Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan menggunakan kerangka pemikiran yang sudah ditulis di atas. Penulis akan menggunakan konsep pluralis yang

California, San Diego, 2002),

<https://escholarship.org/content/qt4zv454f5/qt4zv454f5.pdf?t=krnnnf&v=lg.>, 13-17

³⁹ "Bilateral Agreements and Regional Cooperation," International Labor Organization, 18 Oktober 2013, https://www.ilo.org/asia/areas/labour-migration/WCMS_226300/lang-en/index.htm.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Pracha Vasuprasat, "Inter-State Cooperation on Labour Migration: Lessons Learned from MOUs between Thailand and Neighbouring Countries," *ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration Working Paper No.16*, July 2008, https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_406_engl.pdf, 22-24

menghasilkan kerjasama internasional, lalu menggunakan konsep ketenagakerjaan, dan dilengkapi dengan teori migrasi pekerja yang berlatar belakang ekonomi.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif.⁴² Alasan penulis memilih metode kualitatif untuk melaksanakan penelitian ini adalah, permasalahan yang penulis pilih merupakan masalah sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai. Penulis memiliki pemahaman bahwasanya dengan menggunakan metode kualitatif, penulis akan lebih mudah mencari data, mengumpulkan data, mengolah data, hingga melakukan analisis data-data tersebut. Selain itu, dengan menggunakan metode kualitatif penulis harap dapat memudahkan penulis dalam memberikan penjelasan mengenai permasalahan penelitian dengan lebih baik.⁴³

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif.⁴⁴ Penelitian jenis ini akan mengedepankan penggambaran perilaku maupun pemikiran dari suatu kelompok. Penggambaran interaksi yang terjadi antar variabel akan dilakukan oleh penulis. Hal ini akan menjelaskan perilaku,

⁴² John W. Creswell and J. David. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition)* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2013), 232-238.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Mark R. Leary, *Introduction to Behavioral Research Methods*, (USA Allyn & Bacon, 2001), 23

peristiwa, maupun fenomena yang disebabkan oleh variabel-variabel tersebut secara sistematis.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, sesuai dengan metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif, maka data yang dibutuhkan penulis akan dicari melalui sumber-sumber sekunder.⁴⁵ Penulis akan melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Taiwan dan Indonesia sebagai sumber sekunder utama yang akan dijadikan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan penulis juga akan penulis penuhi dengan melakukan observasi tidak langsung terhadap keberlangsungan kerjasama antar Indonesia dan Taiwan melalui berita-berita online yang tersebar di internet. Dalam melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi berita online ini, penulis akan dengan teliti memilah berita mana yang dapat dijadikan sumber terpercaya dan mana yang tidak. Hal ini penulis lakukan untuk menghindari *hoax* dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang faktual dan dapat diuji guna memenuhi kebutuhan penelitian ini.⁴⁶

⁴⁵ Ibid, 239-240.

⁴⁶ John W. Creswell and J. David. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition)*, 239-240

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pembahasan dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : pada bagian ini mengenai dijelaskan pendahuluan yang meliputi latar belakang fenomena yang menjadikan penulis ingin melaksanakan penelitian ini, identifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, kajian literatur, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II : pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
- BAB III : pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Taiwan.
- BAB IV : pada bagian ini dijelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Taiwan dalam bidang ketenagakerjaan.